RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2018 - 2023

KABUPATEN JAYAWIJAYA
2019

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur patut dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat karunia-Nya, penyusunan dokumen perencanaan lima tahun Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023" dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Strategis ini secara garis besar memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis. Selain itu, RENSTRA ini memuat cara-cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan yakni Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif.

Kami menyadari, dokumen ini masih jauh dari sempurna, namun kami berharap, RENSTRA ini dapat menjadi pedoman dan standar dalam mengarahkan pelaksanaan tugas Bidang Perumahan, Pertanahan, Kawasan Permukiman dan Pertamanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Selain itu dapat menjadi pedoman dalam evaluasi pelaksanaan dan pencapaian indikator keberhasilan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selama periode 2018 - 2023.

Wamena, Maret 2019

KEPALA DINAS

PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

LUDYA ERULEKE LOGO,S.STP,M.Si
PEMBINA
NIP.19821017 200112 2 003

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN JAYA WIJAYA

1 PENDAHULUAN

-

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) untuk periode 5 (Lima) tahun dan juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD.

Rencana Strategis (Renstra) OPD merupakan dokumen perencanaan jangka menengah OPD yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Renstra SOPD disusun guna memberikan masukan bagi penyempurnaan penyusunan dokumen RPJMD. Rancangan akhir Renstra OPD disusun dengan mengacu kepada RPJMD yang sudah ditetapkan dengan Perda. Perubahan perkembangan masyarakat saat ini telah memberikan implikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang lebih baik dan prima. Dalam menjawab tuntutan tersebut, maka instansi pemerintah harus mampu meningkatkan kinerja dan profesionalisme.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya mempunyai tugas melaksanakan tugas kewenangan urusan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan diperlukan kehadirannya untuk menunjang keberhasilan pembangunan daerah. Rencana Strategis Dinas, memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023 sesuai tugas pokok dan fungsi dinas, dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jayawijaya tahun 2018-2023. Program yang disusun dalam Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023 adalah bersifat indikatif, dengan tidak mengabaikan keberhasilan yang sudah dicapai periode sebelumnya dan selaras dengan program Bupati-

Wakil Bupati Jayawijaya Tahun 2018-2023, serta ditujukan untuk akselerasi peningkatan derajat pendidikan, kesehatan dan kebutuhan masyarakat. Program disusun sesuai dengan kewenangan Dinas, lintas OPD dan program kewilayahan sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas. Selanjutnya program tersebut dijabarkan ke dalam rencana kegiatan yang meliputi indikasi pendanaan, kerangka regulasi, sumber pendanaan, mitra Dinas dan lokasi kegiatan dengan memperhatikan rencana tata ruang.

Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan pedoman bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya dalam menyusun rencana kerja tahunan (Renja) Dinas periode tahun 2018-2023. Dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 – 2023 diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan di bidang perumahan, kawasan permukiman, Pertanahan dan pertamanan. Dokumen tersebut menterjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Jayawijaya.

Penyusunan RENSTRA ini berpedoman pada RPJMD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023. Proses pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis dijelaskan sebagaimana gambar berikut :

Gambar1.1

Kerangka Pikir Penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

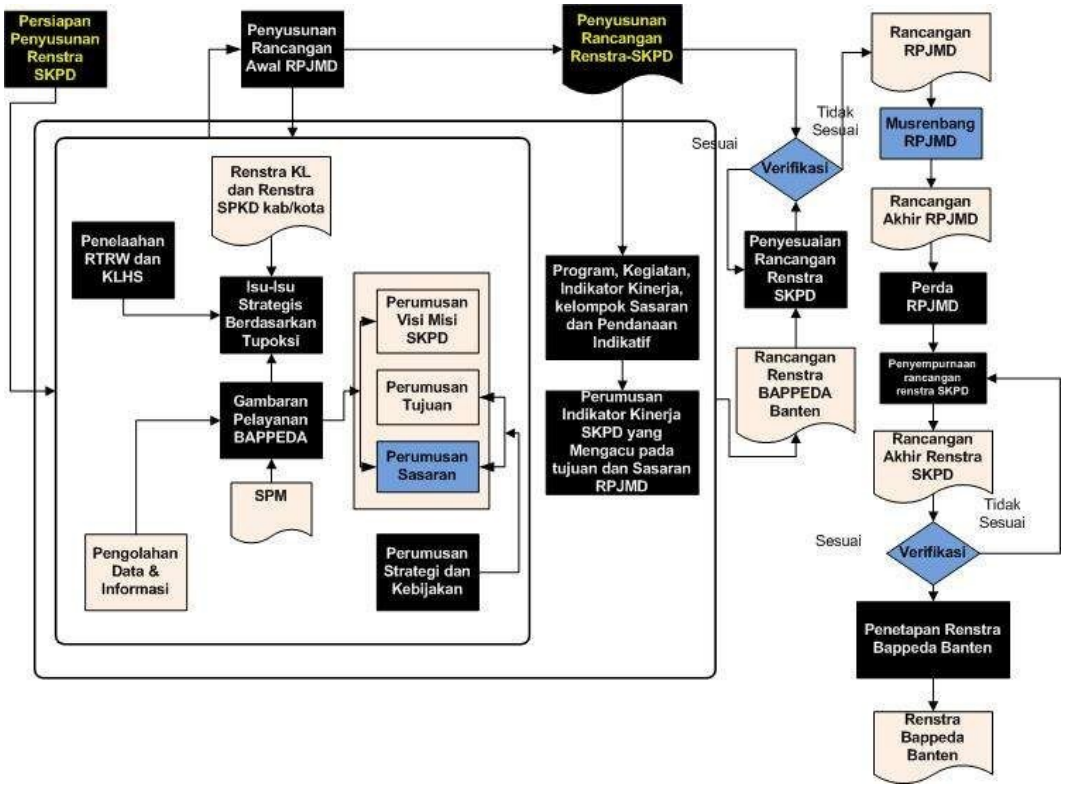

1.2. LANDASAN HUKUM

Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 – 2023 disusun berdasarkan Pancasila sebagai landasan idiil dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional, selain itu Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 – 2023 berpedomaan pada :

1. Undang – undang Nomor : 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan

Kabupaten – kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor : 47);

2. Undang – undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3851);
3. Undang – undang Nomor : 21 Tahun 2001 tentang Pemberian Otonom Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor : 135);
4. Undang – undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 47, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor : 4286);
5. Undang – undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Percepatan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4421);
6. Undang – undang Nomor :23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor : 4437).
7. Undang – undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 126, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor : 4438);
8. Undang – undang Nomor : 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor : 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4700);
9. Undang – undang Nomor : 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor : 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4725);

   Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor : 65 Tahun tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaga Negara Tahun 2005 Nomor : 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4585);

11. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor : 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepala Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaga Negara Tahun 2007 Nomor : 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor : 82, Tambahan Lembaran Negara Tahun 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor : 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor : 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4817);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
17. Instruksi Presiden Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor : 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jayawijaya;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor : 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga – Lembaga Teknis Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor : 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2008-2028;
22 Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor : 9 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayawijaya tahun Anggaran 2014;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor :…… Tahun …….. tentang Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2014;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor : 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 - 2033;
25. Peraturan Daerah Kabupatenn Jayawijaya Nomor : …… Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 – 2023;
26. Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor : 21 tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayawijaya tahun 2014;
27. Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor : 8 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2014.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023 adalah :

a. Menyediakan acuan bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya untuk menyusun rencana kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta dalam penentuan pilihan-pilihan program dan kegiatan tahunan dari berbagai sumber pembiayaan yaitu APBN, APBD, maupun dari sumber pendapatan lain yang sah.

b. Merumuskan arah kebijakan, strategi, prioritas program dan kegiatan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten JayawijayaTahun 2018-2023 adalah :

a. Teridentifikasinya kondisi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya melalui pengukuran pelayanan/ kinerja terkini.
b. Tersusunnya strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan prioritas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupate Jayawijaya berdasarkan kerangka pendanaan indikatif;

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya mengacu pada sistematika Permendagri Nomor : 86 Tahun 2017. Adapun sistematika RENSTRA Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijayaperiode 2018-2023 adalah sebagai berikut :

AB I : PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. : GAMBARAN PELAYANAN DINPERKIM
- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinperkim
- 2.2 Sumber Daya Dinperkim
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinperkim
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinperkim

BAB III. : PERMASALAHAN DAN ISI STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinperkim
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/ Kota
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS RPJMD
3.5. Penentuan Isu – isu Strategis.

BAB IV. : TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinperkim
4.2. Hubungan Tujuan dan Sasaran Dinperkim dan Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB V. : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : P E N U T U P

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR DINPERKIM

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Jayawijaya Nomor : 46 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya melaksanakan Tugas Pokok Membantu Bupati melaksanakan urusan perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Jayawijaya.

1. TUPOKSI,Kepala Dinas.

Mempunyai Tugas Pokokmemimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan.

Untuk Menyelenggaraan Tugas Pokok tersebut, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Umum mempunayi **Fungsi** :

a. Penetapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang perumahan;

b. Penetapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang Kawasan permukiman;

c. Penetapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang pertanahan;

d. Penetapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang pertamanan dan pemakaman;

e. Penetapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang tata usaha, perlengkapan/asset, keuangan dan kepegawaian;

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. TUPOKSI, Sekretariat.

Mempunyai Tugas Pokokmelaksanakan sebagian tugas dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di bidang administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga, keuangan dan perencanaan.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok tersebut Sekretariat mempunyai **Fungsi :**

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan,serta pemantauan,analisis,evaluasi,dan pelaporan di bidang admintrasi umum dan kepegawaian Dinas;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan,koordinasi pelaksanaan kebijakan,serta pemantauan,analisis,evaluasi,dan pelaporan di bidang perencanaan dan keuangan Dinas;
c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3. TUPOKSI, Bidang Kawasan Permukiman

Bidang Kawasan Permukiman melaksanakan sebagian tugas dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di bidang kawasan permukiman.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut bidang Kawasan Permukiman mempunyai **Fungsi :**

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang program penataan kawasan permukiman;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan kawasan permukiman;

4. TUPOKSI, Bidang Perumahan

Bidang Perumahan melaksanakan sebagian tugas dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di bidang perumahan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut bidang Perumahan mempunyai **Fungsi :**

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan perumahan.
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembangunan dan pengembangan perumahan.

5. TUPOKSI, Bidang Pertamanan dan Pemakaman.

Bidang Pertamanandan Pemakamanmelaksanakan sebagian tugas dinas perumahan dan kawasan permukiman di bidang pertamanan dan pemakaman.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, bidang Pertamanan dan Pemakaman mempunyai **Fungsi :**

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pertamanan;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemakaman.

6. TUPOKSI, Bidang Pertanahan.

Bidang Pertanahan melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di bidang pertanahan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut bidang Pertanahan mempunyai **Fungsi** :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan penggunaan tanah;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan penanganan masalah tanah;

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jayawijaya, memiliki susunan organisasi yang terdiri dari :

(1) Kepala Dinas

(2) Sekretariat

  (a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

  (b) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

(3) Bidang Kawasan Permukiman

  (a) Seksi Program Penataan Kawasan Permukiman

  (b) Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman

(4) Bidang Perumahan

  (a) Seksi Perencanaan Perumahan

  (b) Seksi Pembangunan & Pengembangan Perumahan

(5) Bidang Pertamanan dan Pemakaman

  (a) Seksi Pertamanan

  (b) Seksi Permakaman

(6) Bidang Pertanahan

  (a) Seksi Perencanaan Penggunaan Tanah

  (b) Seksi Penanganan Masalah Tanah

2.2. Sumber Daya Dinperkim

Sumber daya manusia merupakan modal utama dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan Kabupaten Jayawijaya.Per bulan Februari tahun 2017 pasca pelantikan pejabat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman jumlah pegawai sebanyak 20 orang,kemudian per juli 2018 bertambah staf 16 orang dan pensiun 1 orang,sehingga jumlah pegawai Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman sebanyak 35 orang. Dengan komposisi sebagai berikut:

1. Susunan Pegawai

Susunan Kepegawaian Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya berdasarkan Eselonisasi adalah sebagaimana tertera pada grafik dibawah ini:

Grafik 2.1
Eselonisasi Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

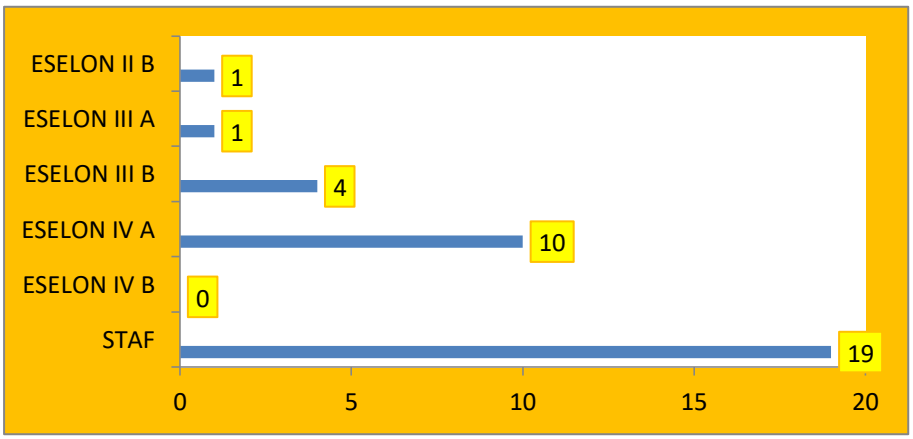

Data pada grafik 2.1 di atas,menunjukan bahwa jumlah staf yang ada pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sudah bertambah dan di tempatkan di sekertariat, bidang perumahan, bidang kawasan permukiman, bidang pertamanan dan pemakaman.

Selain itu,gambaran keadaan pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan pangkat dan golongan adalah sebagaimana tertera pada grafik berikut:

Grafik 2.2

Keadaan Pegawai Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman
Berdasarkan Pangkat Dan Golongan

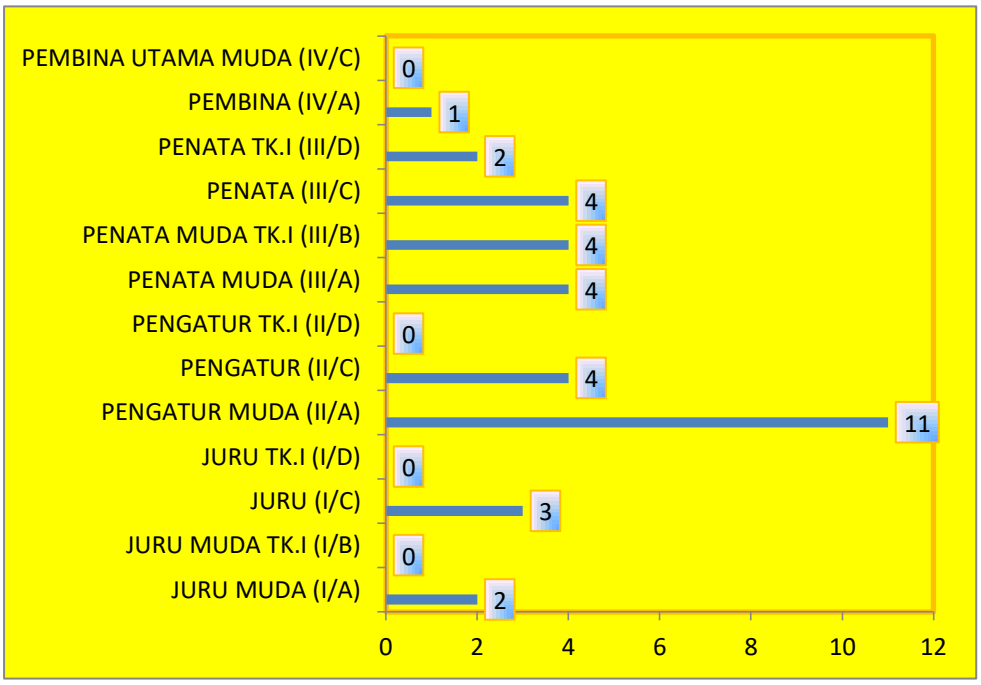

Data pada grafik 2.2 di atas, menunjukan bahwa rata-rata pegawai di dinas perumahan dan kawasan permukiman sudah bergolongan III. Jika dilihat dari masa kerja pegawai yang rata-rata di atas 10 (sepuluh) tahun juga mempengaruhi kinerja dan pengalaman pegawai dalam rutinitas pekerjaan sehari-hari. Gambaran keadaan pegawai dinas perumahan dan kawasan permukiman berdasarkan pendidikan adalah sebagaimana tertera pada grafik berikut:

Tabel 2.3
Keadaan Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

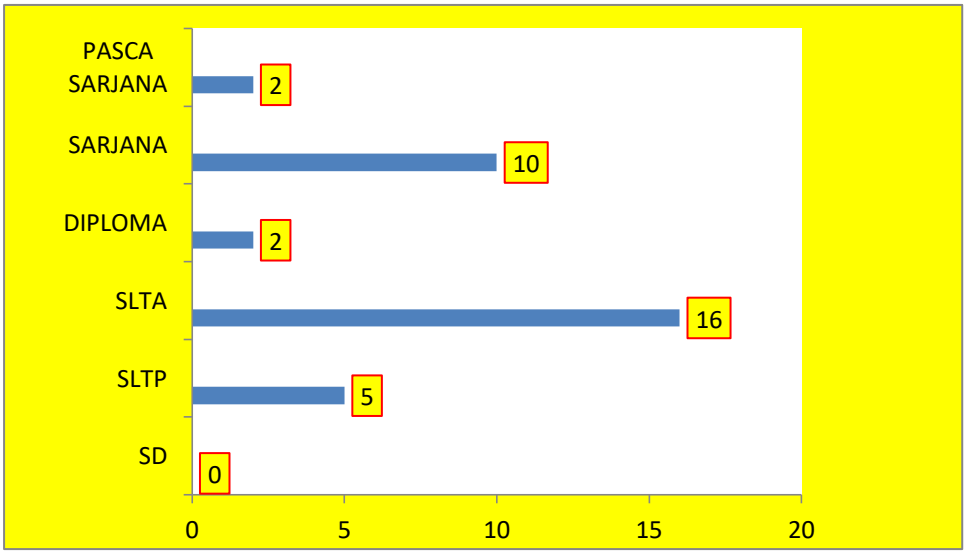

Data pada grafik 2.3 di atas menunjukan bahwa rata-rata pegawai menamatkan pendidikan pada perguruan tinggi. Karena Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menangani 2 (urusan) yaitu urusan perumahan dan pertanahan. Maka disiplin ilmu yang di butuhkan untuk melaksanakan kedua urusan tersebut berbeda-beda. Kondisi tahun 2017 sejak pembentuakn Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman,untuk melaksanakan urusan bidang perumahan dibutuhkan Sarjana Teknik Tata Kota 5 orang dan Teknik sipil 5 orang, namun yang ada saat ini Sarjana Teknik sipil 2 orang dan Sarjana Tata Kota 1 orang. Sehingga hal ini dapat menjadi bahan masukan dalam formasi penempatan pegawai pada masa yang akan datang.

2. Keadaan Sarana dan Prasarana Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sarana Prasarana yang dimaksud meliputi sarana dan prasarana yang merupkan set Pemerintah Kabupaten Jayawijaya,sebagai peralatan kerja Dinas dan sarana prasarana yang merupakan asset Pemerintah Kabupaten Jayawijaya sebagai infrastruktur public. Kondisi Sarana

Prasarana Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kbaupaten Jayawijaya dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Keadaan Sarana dan Prasarana

NO	JENIS SARANA PRASARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	Ruang Kerja	1 Ruangan	Baik dan Fungsi
2	Ruang Rapat	-	-
3	Komputer PC	3 Unit	Baik dan berfungsi
4	Printer	3 Unit	Baik dan berfungsi
5	Telp/Fax	-	-
6	Meja Gambar	-	-
7	Meja Kerja	24 buah	Baik dan berfungsi
8	Kursi Kerja	34 buah	Baik dan berfungsi
9	Almari Dokumen	7 buah	Baik dan berfungsi
10	Meja Rapat	-	-
11	Kursi Rapat	-	-
Jumlah		**71 buah/Unit**	

Berdasarkan Tabel 2.4 di atas, dapat dilihat bahwa sarana prasarana yang digunakan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dikantor masih sangat minim sehingga jumlah dan jenis peralatan yang menunjang pekerjaan administrasi kantor dapat di tingkatkan.

Kondisi sarana prasarana sebagai infrastruktur publik yang menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya adalah sarana dan prasarana TPU serta taman kota yang berada dibawah bidang pertamanan dan pemakaman, sarana dan prasarana perumahan yang berada di bawah bidang perumahan, sarana prasarana kawasan permukiman yang berada di bawah bidang kawasan permukiman. Data Sarana Prasarana yang menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tersebut per 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Sarana dan Prasarana Publik Pemakaman

NO	TEMPAT PEMAKAMAN	LUAS(M^2)	DAYA TAMPUNG
1	Tempat Pemakaman Umum (TPU) Sinakma	1.200	- 600 M^2Sudah ada pagar keliling - Belum ada pos jaga
2	Tempat Pemakaman Umum(TPU) Kuburan Lama	1000	- Belum ada pagar keliling - Belum ada pos jaga

Berdasarkan data jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Jayawijaya serta jumlah penduduk urban dari 8 (delapan) Kabupaten tetangga yang ada di wilayah Pegunungan Tengah papua,maka luas fasilitas TPU yang ada di Kabupaten Jayawijaya masih belum cukup untuk memenuhi jumlah orang yang meninggal. Serta melihat tingginya angka kematian penduduk akibat HIV serta penyakit lainya,maka pemerintah daerah harus menyediakan pelayanan pemakaman yang lebih baik.

Tabel 2.6
Sarana dan Prasarana Publik Taman Kota

NO	TAMAN KOTA	LUAS(M^2)	KONDISI
1	Taman Kota Pepera		Baik dan Terawat
2	Taman Kota city of Wamena		Baik dan Terawat
3	Taman Bandara 1		Baik dan Terawat
4	Taman Bandara 2		Baik dan Terawat
5	Taman J.B Wenas (Jalur Hijau)		Baik dan Terawat
6	Lampu Taman		Baik dan Terawat

Sampai dengan Tahun 2019, kota wamena memiliki 5 (lima) lokasi taman kota, yang menjadi fasilitas publik, diharapkan dengan perkembangan kota yang semakin pesat maka lokasi taman kota atau wilayah penghijauan yang lebih luas dapat disiapkan oleh pemerintah sebagai tempat rekreasi dengan konsep rekreasi edukatif.

RENCANA STRATEGIS

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN & KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN JAYAWIJAYA

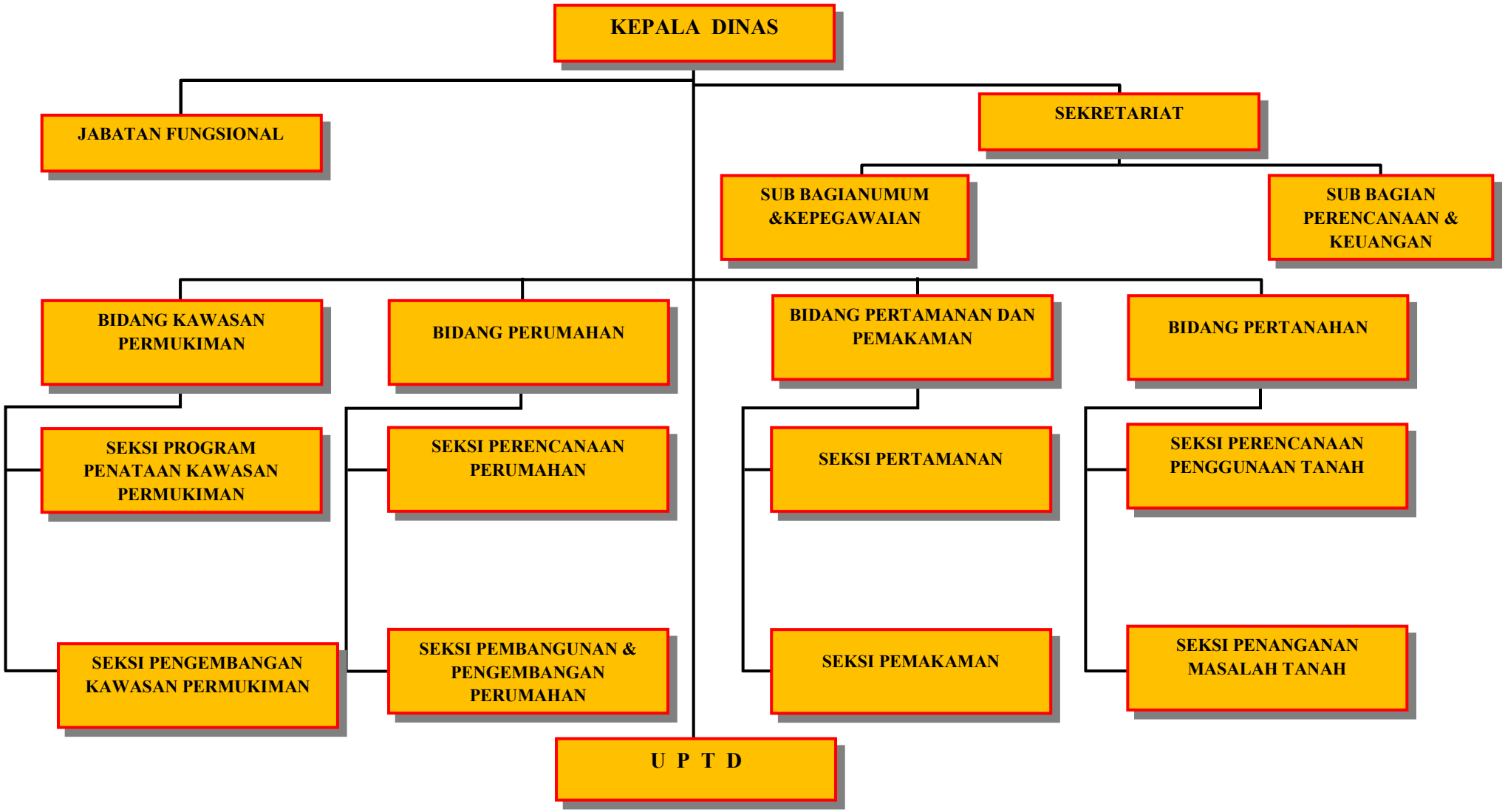

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan dua urusan pemerintahan wajib. Yaitu : Urusan Perumahan dan Urusa Pertanahan. Selain itu bidang tugas seperti Pertamanan dan Permakaman serta Kawasan Permukiman juga dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Gambaran umum kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya untuk lima tahun sebelumnya yang dijadikan pengukuran kinerja berdasarkan 2 (dua) urusan (Perumahan, da pertanahan) yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- ***Pembangunan rumah sehat Type 36***

2014	2015	2016	2017	2018	Jumlah (unit)
25	25	30	29	30	139

Pembangunan rumah sehat type 36 yang dilaksanakan dari tahun 2014, bersumber dari APBD dana Otonomi Khusus dan sudah dilaksanakan pada 40 Distrik. Rumah type 36 dikhususkan untuk Masyarakat Orang Asli Papua (OAP) yang Berpenghasilan Rendah (MBR).

- ***Pembangunan rumah khusus dan rumah strategis type 45***

2014	2015	2016	2017	2018	Jumlah (unit)
30	30	50	100	100	310

Pembangunan rumah khusus dan rumah strategis beradal dari sumber dana APBN, Kabupaten Jayawijaya setiap tahun sejak tahun 2017 mendapatkan jumlah rumah sebanyak 100 unit, sehingga total yang sudah dibangun sejak tahun 2014 s.d 2018 sebanyak 310 unit rumah.

- ***Rehabilitasi rumah masyarakat melalui program BSPS***

2014	2015	2016	2017	2018	Jumlah (KK)
75	150	100	200	175	700

Untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan program peningkatan rumah kumuh menjadi rumah layak huni yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat sesuai RPJMN, program BSPS bersumber dari dana APBN yang ditujukan bagi Kepala Keluarga yang berpenghasilan

rendah. Sampai dengan tahun 2018, jumlah Kepala Keluarga yang sudah mendapatkan bantuan sebanyak 700 Kepala Keluarga.

- ***Rehabilitasi rumah dinas***

2014	2015	2016	2017	2018	Jumlah (unit)
-	-	-	-	3	3

Selama 5 tahun, belum dilaksanakan kegiatan rehabilitas rumah dinas, akan tetapi untuk tahun 2018 dilakukan kegiatan rehabilitas 3 unit rumah dinas, masing-masing rumah dinas Kepala BKDPSDM, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Kepala Dinas Perikanan.

- ***Rehabilitasi asrama dan pengadaan meubelair asrama***

2014	2015	2016	2017	2018	Jumlah (unit)
1	-	-	2	1	4

Asrama yang menjadi milik Pemda Jayawijaya sebanyak 9 asrama yang tersebar pada 7 kota study, masing-masing, di kota study jayapura ada 3 asrama, kota study manokwari 1 asrama, kota study merauka 1 asrama, kota study manado 3 asrama, kota study surabaya 1 asrama, kota study yogyakarta 1 asrama dan kota study jakarta 1 asrama. Tahun 2014 diadakan rehab asrama mahasiswa merauke, tahun 2017 pengadaan asrama mahasiswa jakarta dan rehabilitasi asrama mahasiswa surabaya, tahun 2018 rehabilitasi asrama mahasiswa jayapura 1 unit yaitu asrama nayak.

- ***Pengadaan tanah pemerintah***

2014	2015	2016	2017	2018	Jumlah
500 M²	1 Ha	2 Ha	10 Ha	500 M²	14 Ha

Sejak tahun 2014 s.d 2018, pemda melakukan kegiatan pembebasan lahan untuk pembangunan fasilitas publik, diantaranya adalah pergeseran Kabupaten Jayawijaya, pembebasan lahan untuk pembangunan RS Vertikal, pembebasan lahan matas air wasi, pembebasan lahan pembangunan jembatan hepuba dan pembebasan lahan untuk TPU.

- ***Pensertifikatan tanah Pemda***

2014	2015	2016	2017	2018	Jumlah
-	500 M²	-	7 Ha	3 Ha	11 Ha

Kegiatan pensertifikatan tanah aset pemda, selama 5 tahun dilaksanakan untuk 11 Ha tanah. Sedangkan tahun 2014 dan 2016 tidak dilaksanakan kegiatan pensertifikatan tanah. Jumlah tanah pemda yang sudah bersertifikat sampai dengan tahun 2018 sebesar 42 persen.

- ***Penyelesaian kasus tanah yang menjadi asset Pemerintah Daerah***

2014	2015	2016	2017	2018	Jumlah
100	100	100	100	100	100

Selama 5 tahun, kasus tanah negara yang dilaporkan kepada Pemda dapat diselesaikan dengan baik, sehingga capaian kinerja yang didapat adalah 100 persen.

- ***Penataan RTH***

2014	2015	2016	2017	2018	Jumlah
300 M²	300 M²	300 M²	1100 M²	2.000M²	4.000M²

Penataan RTH yang dimaksud adalah penataan RTH Publik sebesar 20 persen. Dari tahun 2014 s.d 2016, penataan RTH dilakukan pada taman publik seluas 300 M², tahun 2017 dibangun RTH pada kawasan bandara sehingga bertambah menjadi 1100 M². Tahun 2018 RTH yang dihitung tidak hanya taman, tetapi RTH berupa lapangan dan halaman yang ada pada instansi otonom dan instansi vertikal sehingga diperoleh luas sebesar 2000 M². Jumlah tersebut akan terus bertambah karena belum dilakukan pendataan pada beberapa instansi pemerintah, baik instansi otonom maupun vertikal.

Tabel 2.7
KINERJA PELAYANAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN JAYAWIJAYA

NO.	Indikator Kerja	Target SPM Nasional	Target IKK	Target Indikator Lainnya (%)	Target RENSTRA 5 Tahun					Realisasi RENSTRA 5 Tahun					Rasio Capaian 5 Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
I	SPM																		
1.	Persentase Luasan Kawasan Permukiman kumuh		--	--	0,49	0,48	0,47	0,46	0,46	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
2.	Persentase rumah layak huni	56,93	--	--	37,01	42,67	49,21	56,75	65,44	1,31	-	-0	-	-	3,53	-	-	-	-
3.	Cakupan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak huni Bagi korban Bencana	74,20	--	--	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Cakupan penyediaan dan rehabilitasi runah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah	28,00	--	--	100	100	100	100	100	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NO.	Indikator Kerja	Target SPM Nasional Tahun 2014 (%)	Target IKK	Target Indikator Lainnya (%)	Target RENSTRA 5 Tahun					Realisasi RENSTRA 5 Tahun					Rasio Capaian 5 Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
I	**SPM**																		
5	Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan	-	--	--	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-	100	-	-	-	-
6	Luas areal pemakaman yang dikelolah (M^2)				41,3	42,2	43,5	43,5	44,6	45,7	-	-	-	-	0	-	-	-	-

NO.	Indikator Kerja	Target SPM Nasional Tahun 2014 (%)	Target IKK	Target Indikator Lainnya (%)	Target RENSTRA 5 Tahun					Realisasi RENSTRA 5 Tahun					Rasio Capaian 5 Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
II	**Indikator Lainnya**	--																	
1	Luas tanah Pemda yang bersertifikat (Ha)				45	47	48	49	50	3	-	-	-	-	6,67	-	-	-	-
2	Jumlah penyelesaian kasus tanah negara (kasus)				0	0	0	2	2	0	0	0	5,00	1	0	0	0	250,00	50,00
3	jumlah penyelesaian ijin lokasi (ijin)				5	40	60	80	100	3	-	-	-	-	6,67	-	-	-	-

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinperkim

1. Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya adalah

a. Belum adanya master plan (rencana induk) dan belum lengkapnya basis data untuk bidang-bidang yang ditangani oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
   Minimnya kuantitas dan kualitas sumber daya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

b. Kurangnya keterpaduan penanganan jalan lingkungan,drainase dan jaringan air bersih MCk pada permukiman kumuh.

c. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kesadaran tata bangunan perumahan sehingga menciptakan suasana permukiman kumuh dan berdampak bencana alam (banjir, longsor dll).

d. Minimnya peraturan, Juknis dan SOP yang berkaitan dengan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertamanan dan Pemakaman serta Pertanahan.

e. Rendahnya keterlibatan seluruh masyarakat terhadap penataan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman.

2. Peluang

Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah :

a. Telah ditetapkannya SPM untuk 2 Indikator Kinerja Bidang Perumahan, sehingga menjadi urusan wajib pelayanan dasar, yang terus di upayakan Percepatan dan
b. Penerapannya.
   Adanya Komitmen Pemerintah Pusat terhadap Percepatan Pembangunan di Kawasan
c. Timur Indonesia.
d. Adanya Mitra Kerja dengan Stakeholders.
   Terbentuknya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai salah satu PD yang melaksanakan urusan Perumahan dan Pertanahan.

Pada bagian permasalahan dan isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mengemukakan beberapa isu strategis yang krusial yang dihadapi oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, berdasarkan identifikasi permasalahan, telaahan visi, misi, program Bupati dan Wakil Bupati serta telaahan KLHS.

3. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Permasalahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah adanya perbedaan pencapaian antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang dengan kondisi saat ini. Selanjutnya secara rinci identifikasi permasalahan berdasarkan indikator kinerja menurut fungsi dan tugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman secara minternal adalah sebagai berikut :

a. Minimnya data
b. Rendahnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur
c. Minimnya sarana dan prasarana

Pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3
Rendahnya Nilai Sakip	- Rendahnya Kapasitas Sumber daya Disperkim	- Rendahnya Kualitas SDM - Kuantitas SDM yang masih Kurang - Kurangnya Sarpras - Minimnya Data

Berdasarkan pokok masalah tersebut di atas, yang sekaligus menjadi dasar pelaksanaan kegiatan dan program yang akan dikejar target pencapaiannya, guna menjawab permasalahan tersebut, maka dibuat lagi Identifikasi masalah menurut fungsi dan tugas per bidang pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman secara spesifik dapat ditabulasikan dalam tabel 3.2 di bawah.

Tabel 3.2
Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi OPD

Jenis Program	Permasalahan
Bidang Perumahan	- Belum jelasnya arah kebijakan pengembangan kawasan permukiman - Kurangnya data base dan rencana induk mengenai perumahan dan kawasan permukiman - Banyaknya jumlah rumah tidak layak huni - Renahnya pemerataan penyediaan prasarana dan sarana umum perumahan
Bidang Kawasan Permukiman	- Masih banyaknya kebutuhan akan jalan lingkungan - Masih banyaknya permukiman kumuh yang belum ditangani - Rendahnya kesadaran masyarakat tentang lingkungan perumahan yang sehat
Bidang Pertamanan dan Permakaman	- Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan RTH dengan masih banyaknya RTH yang dirusak/ tidak sesuai fungsi - Keterbatasan lahan RTH yang tersedia
	- Kurangnya anggaran untuk pengelolaan permakaman - Kurangnya lahan permakaman - Minimnya fasilitas permakaman
Bidang Pertanahan	- Belum tertibnya aset pemda berupa aset tanah - Belum tersusun dan teridentifikasinya kebutuhan pengadaan tanah pemda dalam 5 (lima) tahun. - Kurangnya koordinasi antar stake holder antar Perangkat Daerah yang membutuhkan tanah
	- Tidak adanya dokumen progres dan tahapan penyelesaian permasalahan tanah.

Tabel 3.2 di atas, dapat menggambarkan pelayanan kegiatan serta permasalahan yang dihadapi oleh tiga OPD dalam melaksanakan urusan Perumahan, Lingkungan Hidup dan Pertanahan selama lima tahun terakhir. Sehingga dapat dijadikan acuan dalam perencaan program dan kegiatan untuk lima tahun berikutnya.

3 Telahaan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerahdan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Menelaah visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan untuk mengidentifikasi faktor – faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut.

1. Visi Kepala Daerah Terpilih Periode 2018-2023

Visi pembangunan Kabupaten Jayawijaya dalam lima tahun kedepan yaitu:

"Terwujudnya Masyarakat Jayawijaya

Yang Sejahtera, Mandiri Secara Ekonomi,

2. Misi Kepala Daerah Terpilih Periode 2018-2023

Adapun Misi Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya adalah sebagai berikut:

1) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.
2) Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia.
3) Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Sesuai Potensi Unggulan Lokal dan Pengembangan Wilayah Berbasis Kultural Secara Berkelanjutan.
4) Meningkatkan Kondisi Masyarakat yang Harmonis, Damai dan Utuh dengan Memperhatikan Hak-hak Dasar Orang Asli Papua (OAP).
5) Meningkatkan Infrastruktur untuk Mendorong Sektor Jasa dan Pariwisata secara Berkelanjutan.

Berdasarkan telaahan visi-misi dan program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman, yang sesuai dengan fungsinya memiliki keterkaitan dengan dengan pencapaian misi ke-5 yaitu : ***" Meningkatkan Infrastruktur Untuk Mendorong Sektor Jasa dan Pariwisata Secara Berkelanjutan ".***

Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terhadap pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3.
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinperkim
Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	**Misi 5 :** Meningkatkan Infrastruktur Untuk Mendorong Sektor Jasa dan Pariwisata Secara Berkelanjutan.	- Masih rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana permukiman sebagai akibat dari : 1. keterbatasan anggaran 2. kurangnya SDM yang mempunyai skill perencanaan kota. 3. Lemahnya data base untuk menghasilkan perencanaan program yang baik. 4. Lemahnya pembinaan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sarana perumahan dan permukiman	- Keterbatasan anggaran - Keterbasatan SDM - Lemahnya database perencanaan	- Adanya Komitemen dan kebijakan pimpinan Peningkatan pembinaan untuk meningkatkan peran serta masyarakat

1.3. TelahaanRenstra K/L, RenstraKementerian Pekerjaan Umumdan Perumahan Rakyat

Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah ***'Terwujudnya Infratruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Handal dalam Mendukung Indonesia yang berdaulat, Mandiri dan BerkepribadianBerlandaskan Gotong Royong***'. Sedangkan misi Kementerian PU dan Perumahan Rakyat adalah:

1) Mempercepat pembangunan infratruktur sumber daya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan dan kedaulatan energy guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi.
2) Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim.
3) Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia indonesia sejalan dengan prinsip ‘ insfrasrtuktur untuk semua’.
4) Mempercepat pembangunan infratruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI.
5) Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efektif, pelaksanaan yang tepat dan pengawasan yang ketat.

Berdasarkan uraian visi dan misi kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di atas, maka dapat dilihat sinkronisasi antara misi Kementrian PU dan Perumahan Rakyat dengan Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya periode 2018 – 2023.

Permasalahan pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya berdasarkan sasaran Kementerian PUPR dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan Dinperkim Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian PUPR beserta Faktor Penghambat dan Pendorong

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian PUPR	Permasalahan Pelayanan Dinperkim Kabupaten Jayawijaya	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman	Masih rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana permukiman sebagai akibat dari: 1. keterbatasan anggaran 2. kurangnya SDM yang mempunyai skill perencanaan kota. 3. Lemahnya data base untuk menghasilkan perencanaan program yang baik. 4. Lemahnya pembinaan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sarana perumahan dan permukiman	- Keterbatasan anggaran - Keterbasatan SDM - Lemahnya database perencanaan	- Adanya Komitemen dan kebijakan pimpinan - Peningkatan pembinaan untuk meningkatkan peran serta masyarakat
2.	Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman			

Permasalahan pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya berdasarkan sasaran Renstra Dinas Perumahan danKawasanPermukiman Provinsi Papua beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.5.
Permasalahan Pelayanan Dinperkim Kabupaten Jayawijaya berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Perumahan Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinperkim Provinsi Papua	Permasalahan Pelayanan Dinperkim Kab. Jayawijaya	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya ketersediaan perumahan rakyat yang layak huni	Masih rendahnya tingkat aksesmasyarakat terhadap sarana rumah layak huni	Keterbatasan anggaran, SDM dan lemahnya database perencanaan untuk programberkelanjutan	- Adanya Komitemen dan kebijakan pimpinan - Peningkatan pembinaan untuk meningkatkan peran serta masyarakat

Berikut akan ditampilkan tabel perbandingan capaian sasaran kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perumahan Provinsi Papua serta Kementerian PU dan Perumahan Rakyat yang diukur dengan menggunakan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Perumahan. Adapun capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel 3.6 di bawah ini.

Tabel 3.6
Kamparasi Capaian Sasaran Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya terhadap Sasaran Renstra Dinas Perumahan Rakyat ProvinsiPapua dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten	Capaian pada Renstra Dinperkim Provinsi	Sasaran pada Renstra K/L
1	Berkurangnya Luasan Permukiman Kumuh di kawasan perkotaan	Tercapainya pada Profil SPM 6,01 %	Tercapainya 60,00 %	Tercapainya 60,00 %
2	Tersedianya luasan RTH public sebesar 20 % dari Luas Wilayah kota/perkotaan	Tercapainya pada Profil SPM 35,32 %	Tercapainya 35,32 %	Tercapainya 35,32 %

3.4. TelahaanRencanaTata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penataan ruang wilayah Kabupaten Jayawijaya bertujuan untuk mengembangkan wilayah yang progresif/berdaya-saing dan berkelanjutan berbasis pariwisata dan pertanian dalam rangka mewujudkan masyarakat Jayawijaya yang sejahtera, demokratis, dan berdaya saing dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan.

Permasalahan di bidang penataan ruang antara lain: (1) belum lengkapnya peraturan perundangan pelaksanaan penataan ruang di daerah; (2) rencana tata ruang belum sepenuhnya dijadikan acuan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah dan rencana pembangunan sektor; (3) masih lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang; dan (4) masih lemahnya kepastian hukum dan koordinasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas menyiapkan rencana pengembangan kawasan permukiman dan perumahan layak huni sangat memerlukan

master plan tata ruang yang jelas, sehingga letak dan lokasi pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan perumahan dapat dibangun dan diatur sesuai dengan fungsi penggunaan lahan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen tata ruang Kabupaten Jayawijaya.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau KHLS adalah rangkaian analisis yang sistemmatis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memsatikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan atau program.

Mempertibangkan fungsi KLHS tersebut maka analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan SKPD Kabupaten Jayawijaya yang berimplikasi negative terhadap Lingkungan Hidup, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS.

Tabel 3.7

Kajian Lingkungan Hidup Strategis

No	Aspek Kajian	Ringkasan KHLS	Implikasi terhadap Pelayanan SKPD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan SKPD
1	Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup	• Alih fungsi lahan di Kabupaten Jayawijaya relative sedang, cendrung meningkat, khusus alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian. • Terganggunya keseimbangan system hidrologi air bawah permukaan.	• Diperlukan penataan kawasan permukiman dan kawasan budidaya yang memperhatikan kaidah konservasi lahan. • Diperlukan struktur jaringan jalan yang berkualitas.	Program Pembangunan Rumah Layak Huni,
2	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim.	• Meningkatnya Polusi udara. • Meningkatnya pemanasan global.	Diperlukan sosialisasi teknis pembangunan dan permukiman	Program Pelatihan Teknis Bidang Permukiman.

3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis

Berdasarkan data RPJMD Kabupaten Jayawijaya, isu strategis bidang perumahan dan permukiman adalah isu strategis ke 4 yaitu ***Pemerataan kebutuhan infrastruktur dasar dan penunjang;***isu strategis yang merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlangsungan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Berikut adalah hasil analisis mengenai isu strategis pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukima.

1. Belum memadainya penyediaan sarana dan prasarana dasar permukiman dan masih banyaknya rumah yang tidak layak huni.
2. Menurunnya kualitas lingkungan permukiman sehingga tumbuh kawasan kumuh di perkotaan;
3. Belum tersedianya peta masalah yang terukur tentang lingkungan dan kawasan permukiman kumuh untuk fasilitas penanganan kawasan kumuh.
4. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk turut memelihara RTH yang telah ada.
5. Belum adanya data lahan pemakaman umum yang lengkap
6. Belum optimalnya pengelolaan tanah pemerintah dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam perizinan dan pensertifikatan tanah.
7. Belum optimalnya sertifikasi tanah aset pemda.
8. Kurangnya pemahaman aparatur tentang hukum pertanahan.
9. Permohonan pengadaan tanah belum dilengkapi dokumen perencanaan atau dokumen perencanaan bersamaan dengan kegiatan pengadaan tanah.
10. Minimnya peraturan, juknis dan SOP yang berkaitan dengan penertiban Perumahan, Pengembangan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Pertamanan dan Pemakaman.

4 TUJUAN DAN SASARAN DINPERKIM

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai faktor-faktor penentu keberhasilan yang menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Tujuan yang ditetapkan Dinperkim Kabupaten Jayawijaya yang mengacu pada Sasaran RPJMD sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Jayawijaya (Tahun 20018-2023)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatkan kualitas penataan kawasan permukiman yang sehat	Meningkatkan akses masyarakat terhadap sarana dan prasaranadasar perumahan	Persentase luasan kawasan permukiman kumuh (%)	0,50	0,49	0,48	0,47	0,46	0,46
			Persentase rumah layak huni (%)	32,09	37,01	42,67	49,21	56,75	65,44
			Persentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	0	20	40	60	80	100
			Persentase Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah	0	20	40	60	80	100
		Meningkatnya pemeliharaan dan penataan taman kota, RTH yang berbudaya dan kreatif	Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan	5 %	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
		Meningkatnya pengelolaan areal	Luas areal pemakaman yang dikelolah (M^2)	40 %	41,3	42,4	43,5	44,6	45,7

		pemakaman							
2	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya ketersediaan tanah untuk kegiatan pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat	Persentase luas lahan bersertifikat	42 %	45	47	48	49	50
			penyelesaian kasus tanah Negara	0	20	40	60	80	100

4.2 Hubungan Tujuan dan Sasaran PD dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD

Hubungan / keterkaitan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dengan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RMPJMD) dapat dijelaskan pada Tabel 4.2 sebagai berikut :

Tabel 4.2.

Hubungan Tujuan dan Sasaran Dinperkim Dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Jayawijaya 2018 – 2023

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023
Misi 5 : Meningkatkan Infrastruktur Untuk Mendorong Sektor Jasa dan Pariwisata Secara Berkelanjutan.	Meningkatkan kualitas penataan kawasan permukiman yang sehat	Meningkatkan kualitas penataan kawasan permukiman yang sehat	Persentase penanganan luasan permukiman kumuh diperkotaan (%)	0,50	0,49	0,48	0,47	0,46	0,46
			Persentase rumah layak huni (%)	32,09	37,01	42,67	49,21	56,75	65,44
			Persentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	0	20	40	60	80	100
			Persentase Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat	0	20	40	60	80	100

			yang terkena relokasi program pemerintah daerah						
		Meningkatnya pemeliharaan dan penataan taman kota, RTH yang berbudaya dan kreatif	Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan	5 %	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
		Meningkatnya pengelolaan areal pemakaman	Luas areal pemakaman yang dikelolah (M²)	40 %	41,3	42,4	43,5	44,6	45,7
2	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya ketersediaan tanah untuk kegiatan pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat	Persentase luas lahan bersertifikat	42 %	45	47	48	49	50
			penyelesaian kasus tanah negara	25	12	32	52	72	92

5.1. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi untuk mencapai Tujuan dan sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya dihasilkan dari posisi Strategis hasil analisa lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Dari analisa lingkungan strategis yang telah dilakukan maka dapat disusun strategi dan arah kebijakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya sebagai berikut:

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinperkim Kabupaten Jayawijaya

Visi : " Terwujudnya Masyarakat Jayawijaya Yang Sejahtera, Mandiri Secara Ekonomi, Berkualitas dan Berbudaya "			
Misi 5 : " Meningkatkan Infrastruktur untuk Mendorong Sektor Jasa dan Pariwisata secara Berkelanjutan "			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatkan kualitas penataan kawasan permukiman yang sehat	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar perumahan	Pengembangan Perumahan	Pembangunan rumah sehat, rumah khusus dan rumah swadaya bagi masyarakat ekonomi lemah.
		Penataan Lingkungan sehat perumahan	Pemberian stimulasi pembangunan perumahan
	Meningkatnya pemeliharaan dan	Pengembangan RTH dan jalur penghijauan	Penambahan RTH dalam kawasan kota

	penataan taman kota, RTH yang berbudaya dan kreatif		Peningkatan sarana dan prasarana dalam taman kota seperti lampu taman, kursi dll.
	Meningkatnya pengelolaan areal pemakaman	Peningkatan layanan pemakaman	Peningkatan fasilitas areal pemakaman seperti pagar dan pos jaga.
Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	meningkatnya ketersediaan tanah untuk kegiatan pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat	Penyediaan tanah untuk sarana publik	Pengadaan tanah untuk kepentingan publik
			Pensertifikatan tanah aset pemda

6.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana Program selama 5 (lima) tahun untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya dalam matriks yang berisi tujuan, sasaran, indikator sasaran, indikator kinerja yang meliputi indikator kinerja program dan kegiatan, kondisi awal dan kondisi akhir.

Program yang direncanakan pada dasarnya untuk melaksanakan program prioritas RPJMD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023. Namun untuk keberhasilan pelaksanaan program prioritas, diperlukan program yang dapat mendukung dan menunjang kelancaran pelaksanaanya. Selanjutnya program-program tersebut dijabarkan lebih lanjut kedalam rencana kegiatan. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program didasarkan pada strategi dan kebijakan jangka menengah Dinperkim Tahun 2018-2023. Secara umum Program yang ada di Dinperkim Kabupaten Jayawijaya secara lebih terperinci, tujuan, sasran, indikator sasaran, indikator kinerja yang meliputi indikator kinerja program dan kegiatan, kondisi awal, kondisi akhir dan target pendanaan indikatif disajikan pada tabel 6.1.

TABEL 6.1.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN JAYAWIJAYA TAHUN 2018 - 2023

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN	DATA KINERJA PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA/RPJMD		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
				TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023					
				TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I.	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran**	**100 %**	**12 Bln**	**670.584.000**	**12 Bln**	**906.450.000**	**12 Bln**	**1.333.650.000**	**12 Bln**	**1.488.650.000**	**12 Bln**	**1.523.650.000**	**319 Bln**	**5.922.984.000**		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pelayanan Jasa Surat Menyurat Berjalan dengan Lancar	100 %	12 Bln	3.000.000	12 Bln	5.000.000	12 Bln	180.000.000	12 Bln	180.000.000	12 Bln	180.000.000	60 Bln	548.000.000	Dinperkim	Kab. Jayawijaya
2	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah dan jenis ATK yang tersedia	100 %	37 item	57.264.000	37 item	70.000.000	37 item	70.000.000	37 item	65.000.000	37 item	100.000.000	37 item	362.264.000	Dinperkim	Kab. Jayawijaya
3	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasonal	Jumlah kendaraan dinas yang terbayar pajaknya	100 %	4 3 roda 1 dan 1 roda 4	600.000	4 3 roda 1 dan 1 roda 4	9.800.000	4 3 roda 1 dan 1 roda 4	10.000.000	4 3 roda 1 dan 1 roda 4	10.000.000	4 3 roda 1 dan 1 roda 4	10.000.000	4 3 roda 1 dan 1 roda 4	40.400.000	Dinperkim	Kab. Jayawijaya
4	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	2 Unit	- Jenis	-	6 Jenis	20.000.000	6 jenis	20.000.000	3 jenis	10.000.000	3 jenis	10.000.000	18 Unit	60.000.000	Dinperkim	Kab. Jayawijaya
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan	5 item	2 item	15.000.000	4 item	18.000.000	4 item	20.000.000	4 item	20.000.000	4 item	20.000.000	4 item	93.000.000	Dinperkim	Kab. Jayawijaya
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jenis komponen instalasi listrik/ penerangan	5 jenis	2 jenis	3.650.000	3 Jenis	3.650.000	3 jenis	3.650.000	3 jenis	3.650.000	3 jenis	3.650.000	14 jenis	18.250.000	Dinperkim	Kab. Jayawijaya
7	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah BBM untuk kegiatan kebersihan kota wamena	2 jenis	2 jenis	99.996.000	2 Jenis	100.000.000	2 jenis	100.000.000	2 jenis	100.000.000	2 jenis	100.000.000	2 jenis	499.996.000	Dinperkim	Kab. Jayawijaya
8	Penyediaan Makan dan Minum Rapat	Terlaksananya Makan dan Minum Rapat	100 %	12 Bln	64.524.000	12 Bln	80.000.000	12 Bln	80.000.000	12 Bln	100.000.000	12 Bln	100.000.000	60 Bln	424.524.000	Dinperkim	Kab. Jayawijaya
9	Rapaat-rapat Koordinasi/Konsultasi	Terlaksananya Rapat Koordinasi/Konsultasi Ke Luar	100 %	12 Bln	323.300.000	12 Bln	400.000.000	12 Bln	650.000.000	12 Bln	700.000.000	12 Bln	700.000.000	60 Bln	2.773.300.000	Dinperkim	Luar Wamena

	Ke Luar Daerah	Daerah																	
10	Survey/Monitoring dan Pengawasan Kegiatan Dalam Daerah	Terlaksananya Survey/Monitoring dan Pengawasan Kegiatan Dalam Daerah	100	%	12	Bln	103.250.000	12	Bln	200.000.000	12	Bln	200.000.000	12	Bln	300.000.000	12	Bln	300.000.000	60	Bln	1.103.250.000	Dinperkim	Kab. Jayawijaya
II.	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**26**	**%**	**27**	**%**	**-**	**28**	**%**	**-**	**30**	**%**	**80.000.000**	**31**	**%**	**80.000.000**	**32**	**%**	**90.000.000**	**35**	**%**	**250.000.000**		
1	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pelatihan/Diklat/Bimtek/Sosialisasi	2	Org	5	Org	-	5	Org	-	5	Org	80.000.000	5	Org	80.000.000	5	Org	90.000.000	25	Org	250.000.000	Dinperkim	Luar Papua
III.	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Persentase Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan**	**100**	**%**	**4**	**Dok**	**19.920.000**	**4**	**Dok**	**20.000.000**	**4**	**Dok**	**20.000.000**	**4**	**Dok**	**20.000.000**	**4**	**Dok**	**20.000.000**	**20**	**Dok**	**99.920.000**		
1	Penyusunan Laporan Akintabilitas Kinerja (LAKIP), IRK SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP	1	Dok	3	Dok	9.960.000	3	Dok	10.000.000	3	Dok	10.000.000	3	Dok	10.000.000	3	Dok	10.000.000	15	Dok	49.960.000	Dinperkim	Kab. Jayawijaya
2	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	1	Dok	1	Dok	9.960.000	1	Dok	10.000.000	1	Dok	10.000.000	1	Dok	10.000.000	1	Dok	10.000.000	5	Dok	49.960.000	Dinperkim	Kab. Jayawijaya
IV.	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Layak Fungsi**	**50**	**%**	**55**	**%**	**4.800.000**	**60**	**%**	**6.400.000**	**65**	**%**	**3.006.400.000**	**70**	**%**	**3.006.400.000**	**75**	**%**	**2.506.400.000**	**80**	**%**	**8.530.400.000**		
1	Pembangunan rumah jabatan	Jumalh rumah jabatan yang terbangun	1	Unit	1	Unit	-	1	Unit	-	1	Unit	3.000.000.000	1	Unit	3.000.000.000	1	Unit	2.500.000.000	5	Unit	8.500.000.000	Dinperkim	Kab. Jayawijaya
2	Pembangunan rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang terbangun	525	unit	10	Unit	-	10	unit	-	20	unit	11.000.000.000	5	unit	2.750.000.000	5	unit	2.750.000.000	5	unit	16.500.000.000	Dinperkim	Kab. Jayawijaya
3	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas	4	4 unit roda 2	4	unit	-	4	unit	-	4	Unit	120.000.000	4	Unit	120.000.000	4	Unit	120.000.000	24	unit	360.000.000	Dinperkim	Kab. Jayawijaya
4	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	4	jenis	2	jenis	48.245.000	2	jenis	15.000.000	2	jenis	15.000.000	2	jenis	15.000.000	2	jenis	15.000.000	14	jenis	108.245.000	Dinperkim	Kab. Jayawijaya
5	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Penyediaan, Perbaikan Peralatan dan Pelengkapan Kantor	30	Unit	3	jenis	196.294.000	3	Unit	40.000.000	6	Unit	40.000.000	6	Unit	40.000.000	6	Unit	40.000.000	21	Unit	356.294.000	Dinperkim	Kab. Jayawijaya
6	pengadaan meubelair asrama	Jumlah dan jenis meubelair	5	jenis	-	Jenis	-	-	jenis	-	8	jenis	500.000.000	8	jenis	500.000.000	8	jenis	500.000.000	8	jenis	1.500.000.000	Dinperkim	Makasar dan malang

7	Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	10	unit	10	unit	14.585.000	5	unit	20.000.000	5	unit	20.000.000	7	unit	25.000.000	7	unit	25.000.000	34	unit	104.585.000	Dinperkim	Kab. Jayawijaya
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional dan Surat Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Dipelihara dan Surat Perizinan	4	4 unit roda 2	4	4 unit roda 2	4.800.000	4	4 unit roda 2	6.400.000	4	4 unit roda 2	6.400.000	4	4 unit roda 2	6.400.000	4	4 unit roda 2	6.400.000	4	4 unit roda 2	30.400.000	Dinperkim	Luar Wamena
V.	**Program Pengembangan Perumahan**	**persentase rumah layak huni**	**32**	**%**	**37**	**%**	**6.125.000.000**	**43**	**%**	**7.075.000.000**	**49**	**%**	**7.150.000.000**	**57**	**%**	**7.150.000.000**	**65**	**%**	**7.150.000.000**	**65**	**%**	**34.650.000.000**		
1	Penetapan Kebijakan, strategi dan program perumahan	Jumlah dokumen	3	Dok	1	Dok	-	1	Dok	75.000.000	1	dok	50.000.000	1	Dok	50.000.000	1	Dok	50.000.000	5	Dok	225.000.000	Dinperkim	Kab. Jayawijaya
2	Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha	Jumlah MoU	-	MoU	-	Mou	-	-	Mou	-	1	Mou	100.000.000	1	MoU	100.000.000	1	MoU	100.000.000	3	MoU	300.000.000	Dinperkim	Kab. Jayawijaya
3	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Jumlah penerima bantuan stimulan	700	KK	175	KK	6.125.000.000	200	KK	7.000.000.000	200	KK	7.000.000.000	200	KK	7.000.000.000	200	KK	7.000.000.000	975	M'	34.125.000.000	Dinperkim	Kab. Jayawijaya

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA KINERJA PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA/RPJMD		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
				TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023					
				TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	Jumlah rumah yang dibangun	449 Unit	121 Unit	59.470.060.000,0	120,00 Unit	59.470.060.000,00	120,00 Unit	59.470.060.000,00	120,00 Unit	59.470.060.000,00	120,00 Unit	59.470.060.000,00	601,00 Unit	297.350.300.000,00	Dinperkim	Kab. Jayawijaya
5	Pembangunan gedung asrama (makasar dan malang)	Jumlah gedung yang dibangun	11 Unit	- unit	-	1,00 unit	3.500.000.000	- unit	0	1,00 unit	3.500.000.000	- unit	0	2 unit	7.000.000.000,00	Dinperkim	Malang dan makasar
6	Rehabilitasi asrama mahasiswa (Merauke, menado dan yogya)	jumalah asrama yang direhab	8 unit	- unit	-	1,00 unit	500.000.000	1,00 unit	1.000.000.000	1,00 unit	1.000.000.000	- unit	0	3 unit	2.500.000.000,00	Dinperkim	Yogya, manado dan merauke
7	Pengadaan perlengkapan asrama mahasiswa (nayak jayapura, makasar dan malang)	Jumlah dan jenis perlengkapan	0 unit	- unit	-	15,00 jenis	500.000.000	10,00 jenis	200.000.000	10,00 jenis	200.000.000	- unit	0	35,00 unit	900.000.000,00	Dinperkim	Malang dan makasar
VII.	**Program Lingkungan Sehat Perumahan**	**Presentasi capaian lingkungan sehat dipermukiman kumuh**	**0,50 %**	**0,51 %**	**-**	**0,52 %**	**80.000.000,00**	**0,53 %**	**-**	**0,54 %**	**100.000.000,00**	**0,55 %**	**-**	**0,56 %**	**180.000.000,00**		
1	Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi	0 org	- org	-	200,00 org	80.000.000,00	- org	-	200,00 org	100.000.000,00	- org	-	400,00 org	180.000.000,00	Dinperkim	Kab. Jayawijaya
2	Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan	Jumlah MCK yang dibangun distrik wamena, wouma,	0 unit	- unit	-	10,00 unit	1.438.500.000,00	10,00 unit	1.500.000.000,00	10,00 unit	1.500.000.000,00	10,00 unit	1.500.000.000,00	40,00	5.938.500.000,00	Dinperkim	Kab. Jayawijaya
VIII.	**Program Pengelolaan areal pemakaman**	**presentase areal pemakaman yang dikelolah**	**50,00 %**	**41,30 %**	**0,00**	**42,40 %**	**2.500.000.000,00**	**43,50 %**	**650.000.000,00**	**44,60 %**	**100.000.000,00**	**45,70 %**	**1.150.000.000,00**	**45,70 %**	**4.450.000.000,00**		

1	Penyusunan kebijakan, norma, standar, pedoman dan manual pengelolaan areal pemakaman	Jumlah Dokumen	1,00	Dok	0,00	Dok	0,00	-	Dok	-	1,00	Dok	100.000.000,00	1,00	Dok	100.000.000,00	1,00	Dok	100.000.000,00	4,00	Dok	300.000.000,00	Dinperkim	Kab. Jayawijaya
2	Lanjutan pembangunan pagar keliling kuburan sinakma dan gapura	Luas pagar	600,00	M²	0,00	M²	0,00	1.000,00	M²	2.000.000.000,00	-	M²	-	-	M²	-	300,00	M²	1.000.000.000	1.300,00	M²	3.000.000.000,00	Dinperkim	Kab. Jayawijaya
3	Jalan Lingkar kuburan sinakma	panjang jalan	500,00	M²	0,00	M²	0,00	500,00	M²	500.000.000,00	500,00	M²	500.000.000,00	-	M²	-	-	M²	-	1.000,00	M²	1.000.000.000,00	Dinperkim	Kab. Jayawijaya
4	pemberian perijinan pemakaman	jumlah surat ijin	-	lembar	0,00	Lbr	0,00	-	lbr	-	100,00	lbr	50.000.000,00	100,00	lbr	50.000.000,00	100,00	lbr	50.000.000,00	300,00	lbr	150.000.000,00	Dinperkim	Kab. Jayawijaya
IX.	**Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau**	**Capaian RTH**	**5**	**%**	**0,10**	**%**	**914.090.000**	**0,10**	**%**	**1.000.000.000,00**	**0,10**	**%**	**4.000.000.000,00**	**0,10**	**%**	**1.000.000.000,00**	**0,10**	**%**	**5.000.000.000,00**	**0,10**	**%**	**11.914.090.000**		
1	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH	Luasan RTH yang dikelola	1.100,00	M²	1.100	M²	914.090.000	1.100	M²	1.000.000.000,00	1.100	M²	1.000.000.000	1.100	M²	1.000.000.000,00	1.100	M²	1.000.000.000,00	1.100	M²	4.914.090.000,00	Dinperkim	Kab. Jayawijaya
2	Pengembangan taman rekreasi	Luasan RTH yang dikelola	1.100,00	M²	0,00	M²	0,00	-	M²	-	1.500	M²	3.000.000.000	-	M²	-	2.000	M²	4.000.000.000	3.500,00	M'	7.000.000.000,00	Dinperkim	Kab. Jayawijaya
X.	**Program Pembangunan sistem pendaftaran tanah**	**Persentase luas lahan berseertifikat**	**42**	**%**	**45,00**	**%**	**349850000,00**	**47,00**	**%**	**150.000.000,00**	**48,00**	**%**	**-**	**49,00**	**%**	**250.000.000,00**	**50,00**	**%**	**-**	**50,00**	**%**	**749.850.000,00**		
1	Sosialisasi sistem pendaftaran tanah	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	3.250	orang	3.250	org	349.850.000	600,00	org	150.000.000,00	0,00	org	0,00	600,00	org	250.000.000	0	org	-	4450,00	Unit	749.850.000,00	Dinperkim	Kab. Jayawijaya
XI.	**Program Penyelesaian Konflik-Konflik pertanahan**	**Persentase penguasaan tanah pemda**	**42**	**%**	**45**	**%**	**434.600.000,00**	**47,00**	**%**	**15.600.000.000**	**48,00**	**%**	**5.600.000.000,00**	**49,00**	**%**	**10.600.000.000**	**50,00**	**%**	**5.600.000.000,00**	**50,00**	**%**	**37.834.600.000**		

1	Pembebasan tanah pemda	Luas tanah yang dibayarkan		Ha	500	M^2	364.600.000,00	7,00	Ha	15.000.000.000	5,00	Ha	5.000.000.000,00	10,00	Ha	10.000.000.000	5,00	Ha	5.000.000.000,00	27,5 Ha	Ha	35.364.600.000	Dinperkim	Kab. Jayawijaya
2	Pensertifikatan tanah pemda	Luas tanah yang bersertifikat	11	Ha	3,00	Ha	0,00	5	Ha	300.000.000,00	5	Ha	300.000.000,00	5	Ha	300.000.000,00	5	Ha	300.000.000,00	23,00	Ha	1.200.000.000,00	Dinperkim	Kab. Jayawijaya
3	fasilitasi Penyelesaian konflik pertanahan	Jumlah kasus yang diselesaikan	30	kasus	5,00	kss	70.000.000	10,00	kss	300.000.000	10,00	kss	300.000.000	10,00	kss	300.000.000	10,00	kss	300.000.000	45,00	kss	1.270.000.000,00	Dinperkim	Kab. Jayawijaya

7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisir. Indikator kinerja dimaksud hendaknya bersifat ; (1) Spesifik dan jelas, (2) dapat diukur secara obyektif, (3) relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Adapun indikator yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Dinperkim yang Mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD

No	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Dinperkim	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 2018	Target Kinerja Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
						2019	2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatkan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	Persentase luas lahan bersertifikat	(%)	42	45	47	48	49	50	50
			penyelesaian kasus tanah negara	(%)	100	100	100	100	100	100	100
2	Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar wilayah dan kawasan untuk mendorong sektor jasa dan pariwisata secara berkelanjutan	Meningkatkan kualitas penataan kawasan permukiman yang sehat	Persentase rumah layak huni	(%)	32,09	37,01	42,67	49,21	56,75	65,44	65,44
			Persentase penanganan luasan kawasan kumuh di perkotaan	(%)	0,50	0,49	0,48	0,47	0,46	0,46	0,46
			Persentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak	(%)	0	20	40	60	80	100	100

			huni bagi korban bencana								
			Persentase Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah	(%)	100	20	40	60	80	100	100

Pada tabel 7.1 di atas, dapat dilihat bawah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, **melaksanakan misi 1 yaitu 'Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik'dan misi 5 yaitu, Meningkatkan Infrastruktur untuk Mendorong Sektor Jasa dan Pariwisata secara Berkelanjutan**'. Dengan mengacu pada dokumen RPJMD tersebut, maka indikator kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Urusan Pertanahan ada dua dua yaitu (a) persentase luas lahan bersertifikat dan (b) Penyelesaian kasus tanah negara. Sedangkan dalam urusan perumahan ada empat indikator yaitu (a) Persentase rumah layak huni, (b) Persentase penanganan luasan kawasan kumuh di perkotaan, (c)Persentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencanadan (d) Persentase Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah. Indikator untuk urusan perumahan, khususnya indikator pada point (c) dan (d) diambil dari indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam urusan wajib layanan dasar bidang Perumahan. Sedangkan untuk formulasi dan elemen data indikator kinerja Dinperkim dapat dilihat pada tabel 7.2 di bawah.

Tabel 7.2

Formulasi dan Elemen Data Indikator Kinerja Dinperkim

Indikator Kinerja Utama/ Indikator Kinerja Program	Deskripsi Indikator	Formula	Bidang Penanggung Jawab
Indikator Kinerja Utama (Eselon II)			
1. Persentase penanganan luasan permukiman kumuh diperkotaan (%)	Luasan kawasan kumuh yang tertangani dibagi luasan seluruh kawasan kumuh perkotaan dikali seratus persen	Luasan kawasan kumuh yang tertangani ———————— X 100% Luasan seluruh kawasan kumuh perkotaan	Kapala OPD
2. Persentase rumah layak huni (%)	Jumlah rumah layak huni dibagi jumlah seluruh rumah diwilayah pemda Jayawijaya dikali seratus persen	Jumlah rumah layak huni X 100% Jumlah Seluruh rumah di Jayawijaya	Kepala OPD
Indikator Kinerja Utama (Eselon III)			
3. Persentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Rumah tangga penerima fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/ atau bangunan + rumah tangga penerima subsidi uang sewa+ rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni dibagi jumlah total RT terkena bencana dikali seratus persen	Rumah tangga penerima fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/ atau bangunan + rumah tangga penerima subsidi uang sewa+ rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni **X 100** jumlah total RT terkena bencana	Bidang Perumahan

4. Persentase Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah	Rumah tangga penerima fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/ atau bangunan + rumah tangga penerima subsidi uang sewa+ rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni dibagi jumlah total RT terkena relokasi program pemda yang memenuhi kriteria penerima pelayanan dikali serarus persen	Rumah tangga penerima fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/ atau bangunan + rumah tangga penerima subsidi uang sewa+ rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni **X 100** jumlah total RT terkena relokasi program pemda yang memenuhi kriteria penerima pelayanan	Bidang Perumahan
5. Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan	Luasan RTH yang ada dibagi luasan kawasan perkotaan dikali seratus persen	Luas RTH ——————— X 100% luas kawasan perkotaan	Bidang Pertamanan dan Pemakaman
6. Luas areal pemakaman yang dikelolah (M²)	Luasan areal pemakaman yang dikelola dibagi luasan keseluruhan areal pemakaman dikali seratus persen	Luas areal pemakaman yang dikelolah ——————— X 100% luas areal pemakaman keseluruhan	Bidang Pertamanan dan Pemakaman

7. Persentase luas lahan bersertifikat	Luas lahan bersertifikat di kabupaten jayawijaya dibagi luas lahan yang seharusnya bersertifikat dikali seratus persen	Luas lahan bersertifikat di kabupaten jayawijaya ———————— X 100% luas lahan yang seharusnya bersertifikat	Bidang Pertanahan
8. penyelesaian kasus tanah negara	Jumlah kasus yang diselesaikan dibagi jumlah kasus yang terdaftar dikali seratus persen	Jumlah kasus yang diselesaikan ———————— X 100% Jumlah kasus yang terdaftar	Bidang Pertanahan
9. Cakupan Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan dibagi jumlah seluruh layanan administras perkantoran dikali seratus persen	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan ———————— X 100% Jumlah seluruh layanan administras	Sekretariat
10. Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek/diklat dibagi jumlah seluruh aparatur dikali seratus persen	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek/diklat ———————— X 100% Jumlah seluruh aparatur	Sekretariat
11. Persentase Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan yang disusun dibagi jumlah seluruh laporan dikali seratus persen	Jumlah laporan yang disusun ———————— X 100% Jumlah seluruh laporan	Sekretariat

12. Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Layak Fungsi	Jumlah sarpras dalam kondisi baik dibagi jumlah seluruh sarpras dikali seratus persen	Jumlah sarpras dalam kondisi baik ———————— X 100% Jumlah seluruh sarpras	Sekretariat
13. Presentasi capaian lingkungan sehat dipermukiman kumuh	Luasan kawasan kumuh yang tertangani dibagi luasan seluruh kawasan kumuh perkotaan dikali seratus persen	Luasan kawasan kumuh yang tertangani ———————— X 100% Luasan seluruh kawasan kumuh perkotaan	Bidang Kawasan Permukiman
14. presentase areal pemakaman yang dikelolah	Luasan areal pemakaman yang dikelola dibagi luasan keseluruhan areal pemakaman dikali seratus persen	Luas areal pemakaman yang dikelolah ———————— X 100% luas areal pemakaman keseluruhan	Bidang Pertamanan dan Pemakaman
15. Capaian RTH	Luasan RTH yang ada dibagi luasan kawasan perkotaan dikali seratus persen	Luas RTH ———————— X 100% luas kawasan perkotaan	Bidang Pertamanan dan Pemakaman

16. Persentase luas lahan berseertifikat	Luas lahan bersertifikat di kabupaten jayawijaya dibagi luas lahan yang seharusnya bersertifikat dikali seratus persen	Luas lahan bersertifikat di kabupaten jayawijaya ———————— X 100% luas lahan yang seharusnya bersertifikat	Bidang Pertanahan
17. Persentase penguasaan tanah pemda	Luas lahan pemda yang bersertifikat dibagi jumlah sekeluruhan lahan pemda dikali seratus persen	Luas lahan pemda yang bersertifikat ———————— X 100% Luas keseluruhan lahan pemda	Bidang Pertanahan

Indikator Kerja Utama Eselon IV			
1.Pelayanan Jasa Surat Menyurat Berjalan dengan Lancar	Jumlah Pengadaan Benda-benda pos yang Diadakan / Jumlah Seluruh Pengadaan Benda-benda Pos dikali Seratus persen	Jumlah Pengadaan Benda-benda Pos Yang Diadakan ———————— X 100% Jumlah Benda-benda pos yang Dibutuhkan	Sekretariat

2. Jumlah dan Jenis ATK yang Tersedia	Jumlah dan Jenis ATK dibagi jumlah seluruh ATK dikali seratus persen	Jumlah dan Jenis ATK tahun n ———————— X 100% Jumlah seluruh ATK yang dibutuhkan	Sekretariat
3. Jumlah Kendaraan Dinas yang Bayar Pajak	Jumlah Kendaraan Dinas Yang bayar Pajak dibagi jumlah seluruh Kendaraan Dinas Yang Bayar Pajak dikali seratus persen	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Bayar Pajak Tahun n ———————— X 100% Jumlah seluruh Kendaraan Dinas Yang akan Bayar Pajak	Sekretariat
4. Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki	Jumlah Peralatan Kerja yang di perbaikii dibagi Jumlah seluruh Peralatan Kerja yang Diperbaiki dikali seratus persen	Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki tahun n ———————— X 100% Jumlah Seluruh Peralatan Kerja yang Diperbaiki	Sekretariat
5. Jumlah barang cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang yang Dicetak dan Di gandakan dibagi Jumlah keseluruhan Barang Cetak dan Penggandaan dikali seratus persen	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Tahun n ———————— X 100% Jumlah kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan	Sekretariat

6. Jumlah BBM untuk Kegiatan Kebersihan Kota Wamena	Jumlah BBM yang Diadakan dibagi Jumlah Keseluruhan BBM dikali seratus persen	Jumlah BBM tahun n ———————— X 100% Jumlah BBM yang dibutuhkan	Bidang Pertamanan dan Pemakaman
7. Terlaksananya Makan dan Minum Rapat	Jumlah Makan MinumJumlah Keseluruhan Makan dan minum dikali seratus persen	Jumlah Makan Dan Minum Tahun n ———————— X 100% Jumlah Keseluruhan Makan Minum	Sekretariat
8. Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah perjalanan Luar Daerah dibagi jumlah sekeluruhan Perjalanan Luar Daerah dikali seratus persen	Jumlah Perjalanan Luar Daerah Tahun n ———————— X 100% Jumlah Keseluruhan Perjalanan Luar Daerah	Sekretariat
9.Terlkasananya Survey Monitoring dan Pengawasan Kegiatan dalam Daerah	Jumlah Survey monitoring dan Pengawasan dibagi jumlah Monitoring dan Pengawasan dikali seratus persen	Jumlah Survey monitoring dan pengawasan tahun n ———————— X 100% Jumlah seluruh Survey dan monitoring	Sekretariat

10. Jumlah Aparatur yang mengikuti pelatihan Bimtek/ Sosialisasi	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek dibagi jumlah seluruh Aparatur yang Mengikuti Bimtek dikali seratus persen	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Bimtek tahun n ———————— X 100% Jumlah seluruh Aparatur yang mengikuti Bimtek	Sekretariat
11. Jumlah Dokumen LAKIP, Renja dan Renstra	Jumlah sarpras dalam kondisi baik dibagi jumlah seluruh sarpras dikali seratus persen	Jumlah Dokumen Akuntanbilitas tahun n ———————— X 100% Jumlah seluruh Dokumen	Sekretariat
12. Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	Luasan kawasan kumuh yang tertangani dibagi luasan seluruh kawasan kumuh perkotaan dikali seratus persen	J Jumlah Dokumen Lap Keuangan tahun n ———————— X 100% Jumlah seluruh Lap Keuangan	Sekretariat
13. Jumlah Rumah Jabatan yang Terbangun	Jumlah Rumah Jabatan yang dibangun tahun n dibagi Jumlah seluruh Rumah Jabatan yang dibangun dikali seratus persen	Jumlah rumah Jabatan yang dibangun tahun n ———————— X 100% Jumlah Kebutuhann Rumah jabatan yang akan dibangun	Sekretariat

14. Jumlah Rumah Dinas yang Dibangun	Jumlah Rumah Dinas yang di bangun dibagi Jumlah kebutuhan Rumah Dinas yang dibangun dikali seratus persen	Jumlah rumah Dinas yang Dibangun tahun n ———————— X 100% Jumlah Kebutuhan Rumah dinas	Bidang Pertamanan dan Pemakaman
15. Jumlah Kendaraan Dinas yang Diadakan	Jumlah Kendaraan Dinas yang Diadakan dibagi Kebutuhan Jumlah Kendaraan Dinas dikali seratus persen	Luas lahan bersertifikat di kabupaten jayawijaya ———————— X 100% luas lahan yang seharusnya bersertifikat	Bidang Pertanahan
16. Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang diadakan dibagi jumlah Jumlah Kebutuhan Perlengkapan Gedung Kantor dikali seratus persen	Jumlah Perlengkapan Gedung kantor yang diadakan ———————— X 100% Jumlah kebutuhan perlengkapan gedung Kantor	Sekretariat
17. Terlaksanananya Perbaikan dan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlengkapan dan peralatann kantor yang diperbaiki dibagi jumlah Peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang akan diperbaiki dikali seratus persen	Jumlah Perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang diperbaiki ———————— X 100% Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang akan diperbaiki	Sekretariat

18. Jumlah dan Jenis Meubelair	Jumlah dan jenis meubelair dibagi jumlah dan Jenis meubelair yang akan diadakan dikali seratus persen	Jumlah dan Jenis meubelair yang diadakan pada tahun n ———————— X 100% Jumlah Kebutuhan meubelair yang akan diadakan	Sekretariat
19. Jumlah Peralatan Gedung kantor yang dipelihara	Jumlash Peralatan kantor yang diadakan dibagi Jumlah kebutuhan peralatann dikali seratus persen	Luasan kawasan kumuh yang tertangani ———————— X 100% Luasan seluruh kawasan kumuh perkotaan	Sekretariat
20. Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang Dipelihara dan surat Perijinan	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang terpelihara dibagi Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang akan dipelihara dikali seratus persen	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara ———————— X 100% Jumlah Kendaraan dinas yang akan dipelihara	Sekretariat
21. Jumlah Dokumen Perumahan	Jumlah Dokumen Perumahan dibagi Jumlah Dokemen Perumahan yang akan dibuat dikali seratus persen	Jumlah Dokumen Perumahan ———————— X 100% Jumlah Dokumen Perumahan yang akan dibuat	Bidang Perumahan

22. Jumlah MOU	Jumlah MOU yang Dibuat Tahun n dibagi Jumlah MOU yang akan di Buat dikali seratus persen	Jumlah MOU yang dibuat ———————— X 100% Jumlah MOU yang akan di buat	Bidang Perumahan
23. umlah Penerima Bantuan Stimulan	Jumlah KK yang menerima bantuan dibagi jumlah seluruh KK yang akan menerima dikali seratus persen	Jumlah KK yang menerima Bantuan ———————— X 100% Jumlah seluruh KK yangakan menerima bantuan	Bidang Perumahan
24. Jumlah Rumah yang Dibangun	Jumlah Rumah yang Telah Dibangun dibagi jumlah Rumah yang akan dibangun dikali seratus persen	Jumlah Rumah yang telah dibangun ———————— X 100% Jumlah Rumah yang akan dibangun	Bidang Perumahan
25. Jumlah gedung asrama yang Dibangun	Jumlah Gedung asrama yang dibangun dibagi jumlah seluruh Gedung asrama yang akan dibangun dikali seratus persen	Jumlah Gedung asrama yang dibangun ———————— X 100% Jumlah seluruh gedung asrama yang akan dibangun	Bidang Perumahan
26. Jumlah asrama yang Direhab	Jumlah Asrama yang direhab dibagi Jumlah Asrama yang akan direhab dikali seratus persen	Jumlah Asrama yang direhab ———————— X 100% Jumlah Asrama yang akan direhab	Bidang Perumahan

27. Jumlah dan Jenis Perlengkapan Asrama	Jumlah dan Jenis Perlengkapan Asrama dibagi Jumlah dan Jenis Perlengkapan asrama yang akan diadakan dikali seratus persen	Jumlah dan Jenis Perlengkapan asrama ———————— X 100% Jumlah dan Perlengkapan asrama yang akan diadakan	Bidang Perumahan
28. Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi	Jumlah Orang yang mengikuti bimtek dibagi Jumlah Orang pada OPD dikali seratus persen	Jumlah Orang yang paham tentang lingkungan sehat perumahan ———————— X 100% Jumlah orang yang belum paham ttg link. Sehat perumahan	Bidang Kawasan Permukiman
29. Jumlah MCK yang Dibangun	Jumlah MCK yang Dibangun dibagi luas Jumlah Kebutuhan MCK dikali seratus persen	Jumlah MCK yang akan Dibangun ———————— X 100% Jumlah Kebutuhan MCK	Bidang Kawasan permukiman
30. Jumlah Dokumen Bidang Pemakaman dan Pertamanan	Jumlah Dokumen pemakaman dan Pertanahan yg dibuat dibagi jumlah seluruh dokumen pertamanan dan pemakaman yang akan dibuat dikali seratus persen	Jumlah Dokumen pemakaman dan pertanahan yang dibuat ———————— X 100% Jumlah seluruh dokumen pertamanan dan pemakaman yang akan dibuat	Bidang Pertamanan dan Pemakaman

31. Luas Pagar areal Pemakaman	Panjang pagar yang dibangun dibagi keseluruhan pagar yang akan dibangun dikali seratus persen	Jumlah pagar yang dibangun ———————— X 100% Jumlah Keseluruhan pagar yang akan dibangun	Seksi Pemakaman
32. Panjang Jalan Areal Pemakaman	Panjang Jalan yang dinagun dibagi panjang keseluruhan jalan yang dibangun dikali seratus persen	Panjang jalan yang dibangun ———————— X 100% Panjang keseluruhan jalan yang akan dibangun	Seksi Pemakaman
33. Jumlah Surat Ijin Pemakaman	Jumlah Surat ijin pemakaman dibagi jumlah surat ijin pemakaman yang akan dikeluarkan dikali seratus persen	Jumlah Surat ijin pemakaman ———————— X 100% Jumlah Surat Ijin pemakaman yang akan dikeluarkan	Seksi Pemakaman
34. Luas RTH yang Dikelola	Luasan Areal RTH yang dikelola dibagi luasan keseluruhan areal RTH dikali seratus persen	Luasan areal RTH yang dikelola ———————— X 100% Luasan Keseluruhan Areal RTH	Bidang Pertamanan
35. Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Pendaftaran Tanah	Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi dibagi Jumlah Peserta keseluruhan dikali seratus persen	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi ———————— X 100% Jumlah Peserta Keseluruhan	Bidang Pertanahan

36. Luas Tanah yang Di Bebaskan	Luas Luas Tanah yang Telah dibebaskan dibagi Luas tanah Pemerintah daeraht dikali seratus persen	Las tanah yang yang dibebaskan ———————— X 100% Luas luas tanah pemda	Bidang Pertanahan
37. Luas Tanah yang Bersertifikat	Luas Tanah yang Sudah bersertifikat dibagi Luas tanah Pemda dikali seratus persen	Luas Tanah yang bersertifikat ———————— X 100% Luas Tanah Pemda	Sekretariat
38. Jumlah Kasus Tanah yang diselesaikan	Luas Tanah yang tidak bersengketa dibagi Jumlah Tanah yang bersengketa dikali seratus persen	Jumlah Tanah yang bersertifikat ———————— X 100% Jumlah tanah yang bersengketa	Sekretariat

8 PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya tahun 2018-2023 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya tahun 2018-2023 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Dinas Perumahan dan Kawasan Permukimanmaupun di lingkup Kabupaten.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan PermukimanKabupaten Jayawijaya tahun 2018-2023 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Kabupaten Jayawijaya2018-2023 : **"Terwujudnya Masyarakat Jayawijaya Yang Sejahtera, Mandiri Secara Ekonomi, Berkualitas Dan Berbudaya".**

Wamena, Maret 2019

Kepala Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Jayawijaya

Ludya Eruleke Logo,S.STP,M.Si
Pembina
NIP.19821017 200112 2 00

MEWUJUDKAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN YANG OPTIMAL & LINGKUNGAN YANG LAYAK HUNI

Tabel 2.7
2.4. Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Jayawijaya

Urusan : Perumahan

NO.	Indikator Kerja	Target SPM Nasional Tahun 2014 (%)	Target IKK	Target Indikator Lainnya (%)	Target RENSTRA 5 Tahun					Realisasi RENSTRA 5 Tahun					Rasio Capaian 5 Tahun				
					2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012
I	**SPM**																		
1.	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	92.43	--	--															
2.	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	56.93	--	--															
3.	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	74.20																	
4	Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	40.00	--	--	2.00	2.10	2.40	2.60	2.80	2.93	2.95	2.97	3.00	3.22	2.53	2.53	2.49	2.48	2.66